

PENGARUH PARTISIPASI DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, STRUKTUR DESENTRALISASI, DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP KINERJA MANAJERIAL ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DI KABUPATEN BANTUL

Mela Ayu Safitri, Hari Purnama
Program Sarjana Akuntansi, Fakultas Bisnis
Universitas PGRI Yogyakarta
Email: safitrimelaayu@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the effect implementation of influence of budgeting participation, clarity of budget goals and public accountability, decentralization structure and public accountability on the managerial performance at the OPD Bantul. The sample used was 78 respondent with purposive sampling method. The analysis technique used in this research was multiple linear regression analysis. These result conclude that simultaneously budgeting participation, clarity of budget goals and public accountability and decentralization structure have a effect on managerial performance, partially the budgeting participation, clarity of budget goals and decentralization structure has a effect on managerial performance. In contrast, public accountability do not affect the managerial performance.

Keywords: *budgeting participation, clarity of budget goals, decentralization structure, public accountability, managerial performance.*

ABSTRAK

Riset ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi serta akuntabilitas publik pada kinerja manajerial OPD Bantul. Jumlah sampel yang digunakan dalam riset ini 78 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan pada riset ini yakni analisis regresi linear berganda. Hasil riset menunjukkan bahwasanya secara simultan variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan akuntabilitas publik berpengaruh pada kinerja manajerial, secara parsial partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran serta struktur desentralisasi berpengaruh pada kinerja manajerial. Hasil sebaliknya menunjukkan bahwasanya akuntabilitas publik tidak berpengaruh pada kinerja manajerial.

Kata kunci: partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi dan akuntabilitas publik, kinerja manajerial.

PENDAHULUAN

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini telah sukses mencuri minat masyarakat, terutama semenjak munculnya kondisi yang demokratis pada pemerintahan. Masyarakat saat ini tengah mempersoalkan nilai yang mereka terima terkait pelayanan oleh institusi PEMDA (Helmiyah & Murhaban, 2016). Adanya tuntutan masyarakat pada kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik yang lebih baik untuk melaksanakan seluruh kegiatan operasionalnya dan menjamin dilaksanakannya

pertanggungjawaban publik terhadap institusi sektor publik, oleh sebab itu diperlukannya pengendalian terhadap institusi sektor publik. Untuk dapat menghasilkan suatu laporan yang dapat diandalkan, maka diperlukan pengendalian yang terstruktur. Pencapaian prestasi kerja PEMDA didalam mengemban tanggung jawabnya mampu ditinjau berdasarkan pelaporan keuangan yang telah disediakan oleh PEMDA yang mampu menggambarkan sebagai asas pertanggungjawabannya pada masyarakat (Laksana & Handayani,

2014).

Kinerja manajerial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni suatu kunci kesuksesan OPD saat mengemban kewajibannya diPEMDA, apabila prestasi kerja suatu OPD terstruktur, maka akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik. Penilaian terhadap prestasi kerja manajerial OPD menjadi hal yang sangat penting karena penilaian kinerja manajerial akan membantu mengoptimalkan organisasi sektor publik pada pertimbangan suatu keputusan serta penyusunan platform untuk menggapai sasaran atau target suatu institusi *public sector* (Amertadewi & Dwirandra, 2013).

Partisipatif pada pembentukan suatu anggaran adalah komponen yang mampu memajukan prestasi kerja suatu organisasi. Keikutsertaan bawahan pada pembentukan suatu anggaran untuk meningkatkan performa pemerintah dapat memberikan peluang kepada bawahan untuk ikut andil dalam prosedur pembentukan anggaran. Berdasarkan hal ini dalam memperoleh pencapaian yang telah disepakati bersama-sama, penerapannya pun juga harus jelas dan bersungguh-sungguh (Anwar & Sumiati, 2014).

Berdasarkan riset (Badu, Awaluddin, & Mas'ud, 2019; Rahmayati & Jamil, 2019) mendapatkan hasil bahwasanya partisipatif pada pembentukan anggaran berpengaruh ke arah positif pada prestasi kerja aparatur negara. Namun tidak sejalan oleh riset yang dilakukan (Syahputra, 2014) menyatakan tidak menunjukkan pengaruh kearah yang positif variabel partisipasi anggaran pada kinerja manajerial.

Berhasil atau tidaknya tingkatan suatu kinerja manajerial suatu OPD diperlukan adanya kejelasan dalam sasaran anggaran. Pengertian kejelasan sasaran adalah sejauhmana sasaran suatu anggaran ditentukan dengan tepat serta terarah dengan pencapaian anggaran yang diyakini mampu dipahami oleh para pegawai yang dapat bertanggungjawab terkait dengan target sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik

memudahkan pemerintah merancang beberapa rencana terkait dengan kegiatan yang bertujuan akan diraih PEMDA (Kenis, 1979).

Riset yang dilakukan oleh (Efrizar, 2017; Wiprastini, Sinarwati, & Herawati, 2014) menemukan terdapat arah positif sasaran anggaran yang jelas pada kinerja manajerial. Namun hasil tersebut berbeda oleh riset (Ufairah, Tan, & Zamzani, 2016) mengemukakan bahwasanya kejelasan sasaran anggaran tidak melihat adanya pengaruh positif pada kinerja manajerial.

Struktur desentralisasi juga merupakan komponen yang berpengaruh pada kinerja manajerial. Definisi desentralisasi berdasarkan pasal 1 ayat 7 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 terkait PEMDA dapat dinyatakan yakni pemberian otoritas pemerintahan untuk pemerintah pada daerah mandiri untuk mengendalikan serta handle segala urusan-urusan pemerintahan berdasarkan asas NKRI. Pada struktur sentralisasi yang main besar, sebagian keputusan dicetuskan kepada tingkat hierarki suatu organisasi yang tinggi, serta apabila sebagian wewenang melimpahan otorisasi kepada tingkat lebih yang lebih kecil pada suatu organisasi, bahwa organisasi tersebut lebih desentralisasi (Hidayat, 2015).

Riset terdahulu atas variabel struktur desentralisasi dilakukan oleh (Darmawan, 2016; Hidayat, 2015) mengemukakan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif antara struktur desentralisasi pada kinerja manajerial. Namun berbeda dari riset (Primastiwi & Basuki, 2016) mengemukakan bahwasanya tidak terdapat pengaruh yang positif antara struktur desentralisasi pada kinerja manajerial.

Faktor terakhir yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah akuntabilitas publik. (Mardiasmo, 2009) mengemukakan bahwasanya akuntabilitas publik yakni suatu keharusan pihak yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyediakan mengungkapkan, serta mengutarakan seluruh kegiatan serta aktivitas-aktivitas yang mana sudah menjadi

tanggungjawab pihak yang diberi kepercayaan yang mempunyai wewenang serta kekuasaan untuk menjalankan tugasnya.

Riset terdahulu yang dikemukakan (Darmawan, 2016; Melia & Sari, 2019) mendapatkan hasil bahwasanya akuntabilitas memiliki pengaruh positif pada kinerja manajerial. Hasil berbeda ditemukan dari riset (Heski, Purwanti, & Fidayati, 2017) yang mengemukakan bahwasanya akuntabilitas tidak berpengaruh positif pada kinerja manajerial.

Meski riset tentang kinerja manajerial sudah banyak diujikan, namun riset ini penting dikaji kembali dikarenakan mendapati hasil riset yang masih tidak konsisten maka dari itu memotivasi penulis untuk melakukan riset ulang apakah kinerja manajerial OPD di Kabupaten Bantul mempengaruhi partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi serta akuntabilitas publik.

KAJIAN TEORI

1. Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan yang sudah dikaji Edwin Locke tahun 1960 menemukan bahwasanya untuk mendapatkan suatu kinerja yang baik dan sasaran yang mampu diraih maka diperlukannya tujuan yang jelas & rumit. Menurut (Locke & Latham, 2006) untuk meningkatkan prestasi kerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya. Organisasi memberikan peluang pada para anggotanya untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang biasanya kinerjanya makin besar dibanding dengan sasaran yang telah ditentukan manajer. Teori penetapan tujuan mengartikan bahwa hubungan dimana sasaran ditentukan dengan prestasi kerja (kinerja).

2. Kinerja Manajerial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah terdapat di pasal 1 ayat 35, yang memberikan pengertian bahwasanya kinerja merupakan suatu output yang berasal dari suatu kegiatan atau program yang hendak maupun sudah terealisasi terkait dengan pelaksanaan anggaran dengan jumlah serta tingkat yang sudah diukur (Badu et al., 2019). Salah satu faktor yang sangat berpengaruh yang digunakan untuk tolak ukur efektifitas dan efisiensi suatu organisasi disebut dengan kinerja (Hidayat, 2015). Adapun yang disebut dengan merupakan performa yang berasal dari seseorang yang menjadi partisipan dalam suatu kelompok kegiatan-kegiatan eksekutif yang terdiri dari perancangan, investigasi, mengkoordinasi, mengevaluasi, pengendalian, pemilihan karyawan, negosiasi, delegasi maupun penyampaian. Keikutsertaan atasan pada prosedur pembentukan suatu anggaran menjadi hal penting yang berhubungan dengan prestasi kerja manajerial (Supriyatno, 2010).

3. Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran

Suatu pernyataan yang terkait dengan suatu pertimbangan prestasi kerja yang akan dicapai pada waktu yang sudah ditentukan berdasarkan tingkatan moneter disebut anggaran, sementara itu penganggaran dapat diartikan sebagai suatu sistem maupun cara untuk menyiapkan sesuatu yang sudah direncanakan. Suatu anggaran mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan institusi yakni seperti persiapan, pengaturan serta tujuan monitoring. Oleh sebab itu anggaran mampu mengendalikan operasi-operasi unit-unit kerja suatu organisasi yang sama dengan apa yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009). Terdapatnya partisipasi dalam penyusunan mampu bertambah. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila para pimpinan organisasi dipemerintahan bersungguh-sungguh dalam menetapkan suatu tujuan maupun standarnya serta mempunyai rasa tanggungjawab suatu individu untuk

pencapaiannya karena keikutsertaan pembentukan anggaran maka anggaran tersebut akan disetujui secara partisipatif (Milani, 1975).

4. Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut (Kenis, 1979), ciri dari sistem penganggaran merupakan kejelasan suatu sasaran anggaran yang dimana memperlihatkan suatu fungsi anggaran yang ditentukan dengan tetap serta spesifik yang mana suatu anggaran yang disusun mampu dipahami para individu untuk menanggung semua target dalam sasaran perhitungan tersebut. Adanya perhitungan yang disusun secara jelas mampu membantu pemerintah untuk meggapai prestasi kerja yang ditentukan, dengan sasaran anggaran yang sudah yang pasti, akan mempermudah pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan kegagalan ataupun keberhasilan kewajiban-kewajiban organisasi dalam rangka mencapai tujuanserta sasaran yang sudah ditentukan.

(Laksana & Handayani, 2014).

5. Struktur Desentralisasi

Pelimpahan otoritas pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah mandiri berlandaskan dasar otonomi disebut desentralisasi. Dasar otonomi yakni suatu dasar pengaturan yang diterapkan pemerintah daerah yang didasari oleh hak, otoritas, serta keharusan suatu daerah yang akan mengkoordinasi serta mengendalikan pemerintahan tersebut secara mandiri sesuai sistm yang diberlakukan di Indonesia(UU No.23 Tahun 2014). Menurut Maddick (1963) dan (Darmawan, 2016; Hidayati, 2015) mengemukakan bahwasanya yang dimaksud dengandesentralisasi yakni suatu metode untuk memajukan kompetensi aparatur pemerintah serta mendapatkan suatu informasi yang lebih baik terkait kondisi suatu daerah, untuk memudahkan dalam membentuk

program-program suatu daerah agar lebih cepat taggap serta untuk memprediksikan masalah-masalah dengan cepat ketika masalah-masalah yang muncul pada pelaksanaan.

6. Akuntabilitas Publik

Definisi akuntabilitas bisa diartikan menjadi wujud dari sebuah tanggungan yang berpacu dengan siapa aparatur negara bertanggungjawab serta untuk apa aparatur negara menanggungnya. Berdasarkan arti umum akuntabilitas mampu diartikan dengan keharusan yang dipegang oleh pihak yang mempunyai kepercayaan (*agent*) dalam melakukan keharusan yang dilakukan, menyediakan, mengutarakan, melaporkan serta menyajikan seluruh operasi serta aktivitas yang merupakan kewajibannya pada seseorang yang diberi kepercayaan (*principal*) yang mana mempunyai kewajiban serta hak melakukan pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Partisipatif penyusunan sebuah anggaran merupakan suatu tingkatan partisipatif serta terdapat keikutsertaan seseorang dalam penyusunan anggaran (Sumarno, 2005). Adanya kinerja aparatur yang bertambah besar tentunya partisipasi dalam penyusunan aggaran diharapkan mampu meningkat pula. Berdasarkan pada perspektif bahwasanya ketika suatu tujuan ataupun standar yang disusun secara bersama-sama serta disepakati maka suatu pimpinan dalam organisasi pemerintahan akan serius dalam menetapkan suatu tujuan ataupun standar yang ditentukan serta mempunyai tanggungjawab individu untuk meraihnya dikarenakan ikut andil pada pembentukannya (Milani, 1975). Riset (Badu et al., 2019) mengemukakan keikutsertaan individu pada pembentukan suatu anggaranberpengaruh ke arah yang positif pada kinerja manajerial. Riset tersebut didukung oleh riset yang dilakukan (Badu et al., 2019;

Rahmayati & Jamil, 2019) yang mendapatkan hasil bahwasanya ada pengaruh positif variabel partisipasi penyusunan anggaran pada kinerja manajerial OPD.

H₁: Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial OPD di Kabupaten Bantul

Adanya kejelasan dalam suatu sasaran anggaran akan membuat pemerintah dalam meraih prestasi kerja yang diinginkan, yang mana dengan memahami target suatu anggaran yang tepat maka tingkatan prestasi kerja mampu diraih, dengan diterapkannya target suatu anggaran yang tepat mampu mendukung pemerintah agar mampu menanggung segala kesuksesan ataupun kesalahan dalam melakukan tugas organisasi dalam bentuk untuk menggapai sebuah tujuan serta target-target yang sudah ditentukan (Laksana & Handayani, 2014). Riset (Efrizar, 2017; Wiprastini et al., 2014) menerangkan bahwasanya sasaran anggaran yang tepat terdapat pengaruh yang positif pada kinerja manajerial. Hasil riset tersebut juga sejalan riset terdahulu (Efrizar, 2017; Wiprastini et al., 2014) yang mengemukakan bahwasanya sasaran anggaran yang jelas berpengaruh ke arah yang positif pada kinerja suatu manajerial. Berdasarkan pengertian tersebut dapat menjelaskan bahwasanya terdapatnya target anggaran yang tepat maka akan besar pula tingkatan prestasi kerja yang diraih suatu OPD.

H₂: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial OPD di Kabupaten Bantul

Pelimpahan wewenang pemerintahan pada pemerintah pusat oleh daerah otonom berlandaskan asas otonomi disebut desentralisasi. Asas otonomi adalah dasar penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilandaskan atas hak, otoritas, kewajiban suatu daerah otonom untuk menjalankan serta mengatur pemerintahannya secara mandiri yang berlandaskan sistem yang diterapkan di Indonesia(UU No.

23 Tahun 2014). Penyerahan otoritas mampu memberikan rasa tanggungjawab yang lebih tinggi pada organisasi tingkat rendah yang mana secara tidak langsung dapat mempertinggi prestasi kerjanya (Rahmayati & Jamil, 2019). Berdasarkan riset (Darmawan, 2016) didapatkan hasil bahwa desentralisasi terdapat pengaruh yang positif pada kinerja suatu manajerial. Riset tersebut didukung oleh riset (Darmawan, 2016; Hidayat, 2015) yang mengutarakan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif struktur desentralisasi pada kinerja manajerial.

H₃: Struktur desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial OPD di Kabupaten Bantul

(Mardiasmo, 2009) yang dimaksud dengan akuntabilitas publik yaitu suatu keharusan pihak yang memberi kepercayaan akan menyampaikan sebuah pertanggungjawaban, mengutarakan, menyampaikan, serta mempresentasikan seluruh kegiatan serta aktivitas yang sudah menjadi tanggungjawab pada pihak-pihak terkait yang pemberi amanah mempunyai kewenangan serta otoritas untuk menuntut pertanggungjawaban. Keuntungan adanya akuntabilitas apabila makin besar level pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan makin baik dan mampu meningkatkan kerjanya demi mencapai tujuan organisasi tersebut (Darmawan, 2016). Berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Darmawan, 2016) didapatkan hasil bahwasanya ada pengaruh positif akuntabilitas publik pada kinerja manajerial suatu OPD. Riset lebih lanjut telah dilakukan (Melia & Sari, 2019) juga ditemukan hasil yang sama bahwasanya ada pengaruh yang positif akuntabilitas publik pada kinerja manajerial.

H₄: Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial OPD di Kabupaten Bantul

METODE RISET

Populasi dari riset ini berupa OPD yang ada di Kabupaten Bantul sejumlah 36 OPD. Teknik sampel riset menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriterianya yakni kepala dinas/bidang, sekretaris/setingkat sekretaris, serta kasubbag keuangan dan aset. Adapun dasar dalam penetapan sampel untuk riset ini sebab karyawan yang bekerja di jabatan terkait ikut serta keterlibatan pada proses pembentukan suatu anggaran, mengkoordinasi pelaksanaan anggaran, mengevaluasi serta melaporkan anggaran dan menjabat sebagai pimpinan atau manajer setiap kegiatan.

PENGUKURAN VARIABEL

Variabel Dependen

Pengukuran variabel kinerja manajerial berupa 8 indikator diantaranya: perancangan, investigasi, koordinasi, pengevaluasian, monitoring, penentuan karyawan, negosiasi, perwakilan.

Variabel Independen

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berupa 8 indikator diantaranya: kontribusi terkait pembentukan anggaran, keterlibatan terkait pembentukan anggaran, kepuasan dalam mengutarakan argumen, kesediaan untuk memberikan

argumen, tingginya dampak pada penentuan anggaran diakhir kerap sekali seorang manajer maupun teman seprofesi meminta argumen ketika anggaran dibentuk.

Indikator untuk mengukur variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran berupa 7 indikator yaitu: tujuan, kinerja, standar, jangka waktu, sasaran prioritas, tingkat kesulitan, koordinasi.

Indikator untuk mengukur variabel struktur desentralisasi berupa 5 indikator diantaranya: otoritas pada penentuan jumlah, otoritas pada penentuan program serta kegiatan, otoritas pada penentuan keikutsertaan, otoritas pada penentuan skala prioritas, otoritas pada penambahan dan mutasi karyawan.

Pengukuran variabel akuntabilitas publik diukur menggunakan 5 indikator diantaranya: kebijakan, program, manajerial, hukum, keuangan.

TEKNIK ANALISIS DATA

Pengujian riset ini antara lain menggunakan: 1) Statistik Deskriptif; 2) Uji Reliabilitas; 3) Uji Validitas; 4) Uji Hipotesis serta bantuan program SPSS 22.

Deskripsi Data

Kuesioner yang disebar pada 35 OPD pada Kabupaten Bantul dapat disajikan dalam tabel 4.1:

Tabel 4. 1 Rincian Penyebaran dan Pengambilan Kuesioner

Rincian	Jml	Porsentase
Kuesioner disebar	108	100%
Kuesioner kembali	78	72,2%
Kuesioner yang diolah	78	72,2%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 108 kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Sejumlah 78 kuesioner (72,2%) yang disebar kembali dan dapat diolah.

Responden yang mengisi data kuesioner tersebut yakni Kepala Dinas/Bidang, Sekretaris/setingkat Sekretaris, serta Kasubbag Keuangan dan Aset OPD Bantul.

Tabel 4. 2 Deskripsi Responden

Karakteristik	Frekuensi	Porsentase	
Jenis Kelamin	Laki-laki	38	48.72 %
	Perempuan	40	51.28%
	Total	78	100%
Usia	< 25 tahun	6	7.7 %
	25 - 40 tahun	27	34.6%
	40 – 55 tahun	41	52.5%
	> 55 tahun	4	5.2%

	Total	78	100%
Jabatan	Kepala Dinas	7	9%
	Sekretaris Dinas	4	5.12%
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	14	17.94%
	Lainnya	53	67.94%
	Total	78	100%
Lama Bekerja	1 – 5 tahun	24	30.77%
	6 – 10 tahun	10	12.82%
	11 – 15 tahun	14	17.95%
	16 – 20 tahun	7	8.97%
	≥ 21 tahun	23	29.49%
	Total	78	100%
Pangkat/ Golongan	Golongan IV	18	23.07%
	Golongan III	40	51.29%
	Golongan II	20	25.64%
	Total	78	100%

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dilihat berdasarkan spesifikasi gender, terdapat 38 orang atau dengan prosentase 48,72% responden berjenis kelamin laki-laki serta terdapat 40 orang atau dengan prosentase 51,28% responden yang berjenis kelamin perempuan. Dilihat dari spesifikasi responden berdasar umur terdapat 6 orang atau dengan prosentase 7,7% responden yang berumur < 25 tahun, 27 orang atau dengan prosentase 34,6% responden yang berumur 25-40 tahun, 41 orang atau dengan prosentase 52,5% responden yang berumur 40-55 tahun, dan sejumlah 4 orang atau dengan prosentase 5,2% responden yang berumur diatas 55 tahun. Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan jabatan, terdapat 7 orang atau dengan prosentase 9% responden menjabat sebagai Kepala Dinas, 4 orang atau dengan prosentase 5,12% responden menjabat sebagai Sekretaris Dinas, 14 orang atau dengan prosentase 17,94% menjabat sebagai Kasubbag Keuangan dan Aset sebanyak 53 orang atau dengan prosentase 67,94% responden memiliki jabatan lainnya.

Dilihat dari identitas responden berdasarkan lamanya responden bekerja, terdapat 24 orang atau dengan prosentase 30,77% responden bekerja 1 sampai 5 tahun, 10 orang atau dengan prosentase 12,82% responden bekerja 6 sampai 10 tahun, 14 orang atau dengan prosentase

17,95% responden bekerja 11 sampai 15 tahun, 7 orang atau dengan prosentase 8,97% responden bekerja 16 samapi 20 tahun dan sebanyak 23 orang atau dengan prosentase 29,49% responden bekerja lebih dari 21 tahun. Dilihat dari identitas responden berdasarkan pangkat atau golongan, terdapat 18 orang atau dengan prosentase 23,07% responden dengan golongan 1V, 40 orang atau dengan prosentase 51,29% responden dengan golongan III, dan sebanyak 20 responden dengan golongan II.

1. Statistik Deskriptif

Maksud dan tujuan statistik deskriptif yakni memperlihatkan data yang ditunjukkan oleh nilai *mean*, standar deviasi, maksimum serta minimum pada setiap variabel riset, berdasarkan tabel 4.3 memperlihatkan total sampel (N) sebanyak 78 responden. Variabel dependen yaitu kinerja manajerial (Y) menunjukkan skor minimal 14 dan skor maksimal 40, nilai rata-ratanya 31,99 dengan standar deviasi sebesar 4.021. Variabel independen pertama yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran (X_1) menunjukkan skor minimal 18 dan skor maksimal 30, nilai rata-ratanya 23,53 dengan standar deviasi sebesar 2,918. Variabel independen kedua yaitu kejelasan sasaran anggaran (X_2) menunjukkan skor minimal 21 dan skor

maksimal 35, nilai rata-ratanya 29,00 dengan standar deviasi sebesar 2,923. Variabel independen ketiga yaitu struktur desentralisasi (X_3) menunjukkan skor minimal 12 dan skor maksimal 30, nilai rata-ratanya 20,29 dengan standar deviasi sebesar 4,074.

Variabel independen keempat yaitu akuntabilitas publik (X_4) menunjukkan skor minimal 15 dan skor maksimal 25, nilai rata-ratanya 21,21 dengan standar deviasi sebesar 2,253. Tabel dibawah ini merupakan tabel analisis statistik deskriptif.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1)	78	18	30	23,53	2,918
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	78	21	35	29,00	2,923
Struktur Desentralisasi (X_3)	78	12	30	20,29	4,074
Akuntabilitas Publik (X_4)	78	15	25	21,21	2,253
Kinerja Manajerial (Y_1)	78	14	40	31,99	4,021

Sumber: Data primer diolah, 2021

2. Uji Validitas

Hasil dari uji validitas dapat diketahui bahwasanya semua variabel riset yakni kinerja manajerial, partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan

sasaran anggaran, struktur desentralisasi, serta akuntabilitas publik dinyatakan valid, sehingga dapat dilaksanakan uji selanjutnya yaitu uji realibilitas.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Instrumen	Korelasi	Sig (2-Tailed)	Kets
Kinerja Manajerial (Y)	Y.1	0,793**	0,000	Valid
	Y.2	0,687**	0,000	Valid
	Y.3	0,661**	0,000	Valid
	Y.4	0,841**	0,000	Valid
	Y.5	0,832**	0,000	Valid
	Y.6	0,849**	0,000	Valid
	Y.7	0,795**	0,000	Valid
	Y.8	0,797**	0,000	Valid
Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (X_1)	X1.1	0,632**	0,000	Valid
	X1.2	0,803**	0,000	Valid
	X1.3	0,856**	0,000	Valid
	X1.4	0,917**	0,000	Valid
	X1.5	0,782**	0,000	Valid
	X1.6	0,623**	0,000	Valid
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_2)	X2.1	0,840**	0,000	Valid
	X2.2	0,872**	0,000	Valid
	X2.3	0,864**	0,000	Valid
	X2.4	0,839**	0,000	Valid
	X2.5	0,829**	0,000	Valid
	X2.6	0,791**	0,000	Valid

	X2.7	0,633**	0,000	Valid
Struktur Desentralisasi (X ₃)	X3.1	0,815**	0,000	Valid
	X3.2	0,817**	0,000	Valid
	X3.3	0,880**	0,000	Valid
	X3.4	0,884**	0,000	Valid
	X3.5	0,836**	0,000	Valid
	X3.6	0,748**	0,000	Valid
Akuntabilitas Publik (X ₄)	X4.1	0,872**	0,000	Valid
	X4.2	0,938**	0,000	Valid
	X4.3	0,937**	0,000	Valid
	X4.4	0,931**	0,000	Valid
	X4.5	0,825**	0,000	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2021

3. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwasanya instrumen tingkat reliabilitas variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran ada diposisi *range* 0,7-0,9, artinya ada di posisi reliabilitas tinggi, sedangkan kinerja manajerial, kejelasan sasaran

anggaran, struktur desentralisasi, serta akuntabilitas publik berada pada *range* > 0,9 yang artinya ada pada reliabilitas sempurna. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya semua variabel-variabel yang dipakai pada riset ini yaitu reliabel. Variabel dapat disebut reabel sebab nilai *Cronbach's Alpha* menunjukkan hasil yaitu >0,70.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Ket
Kinerja Manajerial (Y)	0,908	Reliabilitas Sempurna
Partisipasi Penyusunan Anggaran (X ₁)	0,863	Reliabilitas Tinggi
Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₂)	0,909	Reliabilitas Sempurna
Struktur Desentralisasi (X ₃)	0,909	Reliabilitas Sempurna
Akuntabilitas Publik (X ₄)	0,940	Reliabilitas Sempurna

Sumber: Data primer diolah, 2021

4. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	β	T	Sig	Hasil
(<i>constant</i>)	1.224	0,363	0,713	
Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran	0,400	2,842	0,006	H1: Diterima
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,566	3,799	0,000	H2: Diterima
Struktur Desentralisasi	0,194	2.176	0,033	H3: Diterima
Akuntabilitas Publik	0,047	0,158	0,768	H4: Ditolak
F hitung = 28,745 Sig. F = 0.000 Adj. R ² = 0,590 Signifikansi < 5%				

Sumber: Data primer diolah, 2021

Dari hasil uji regresi linear berganda diatas dapat ditulis:

$$Y = 1.224 + 0,400X_1 + 0,566X_2 + 0,194X_3 + 0,047X_4 + e$$

Keterangan:

- Y : Kinerja Manajerial
- X₁ : Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran
- X₂ : Kejelasan Sasaran Anggaran
- X₃ : Struktur Desentralisasi
- X₄ : Akuntabilitas Publik
- α : Konstanta
- β : Koefisien regresi
- e : Kesalahan

b. Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian koefisien determinan (R²) yang ditunjukkan nilai R² yaitu 0,590 atau 59,0% yang artinya 59,0% variabel kinerja manajerial mempengaruhi oleh partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi serta akuntabilitas publik, dan sisa pengurannya yaitu 41,0% dipengaruhi variabel lain diluar model peneliti.

c. Uji F

Berdasarkan tabel diatas, nilai sig F yaitu 0.000 yang mana hasil tersebut tidak melebihi 0.05 dapat diartikan bahwasanya beserta partisipasi dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, struktur desentralisasi serta akuntabilitas publik bersamaan (simultan) mempengaruhi kinerja manajerial.

d. Uji t

- a. Nilai t hitung partisipasi dalam penyusunan anggaran yaitu 2,842 dan *p value* bernilai 0,006 dimana nilai signifikansinya tidak melebihi 0,05 (H₁ diterima), artinya partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial di OPD Bantul.
- b. Nilai t hitung kejelasan sasaran anggaran yaitu 3,799 dan *p value* bernilai 0.000 dimana nilai signifikansinya tidak melebihi 0,05 (H₂ diterima), artinya kejelasan sasaran mempengaruhi kinerja manajerial di OPD Bantul.
- c. Nilai t hitung struktur desentralisasi yaitu 2.176 dan *p*

value bernilai 0.003 dimana nilai signifikansinya tidak melebihi 0,05 (H₃ diterima), artinya struktur desentralisasi mempengaruhi kinerja manajerial di OPD Bantul.

- d. Nilai t hitung akuntabilitas publik yaitu 0,158 dan *p value* bernilai 0,768 dimana nilai signifikansinya melebihi 0,05 (H₄ ditolak), artinya akuntabilitas publik tidak mempengaruhi kinerja manajerial di OPD Bantul.

PEMBAHASAN HASIL RISET

1. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial di OPD Kabupaten Bantul

Sesuai analisis, dapat dilihat variabel partisipasi dalam penyusunan anggaran mempengaruhi kinerja manajerial di OPD Bantul karena *p value* 0,006 > 0.05. *Goal setting theory* menyatakan untuk meningkatkan kinerja individu maka tujuan harus ditetapkan oleh individu yang melakukannya dengan cara ikut berpartisipasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Suatu organisasi yang memberi sebuah kesempatan pada pegawainya untuk ikut serta berpartisipasi dalam penentuan tujuan cenderung prestasi kerjanya lebih bagus dibanding dengan tujuan yang ditentukan hanya manajer saja. Artinya riset ini sejalan dengan teori tersebut yang mengemukakan bahwasanya ada pengaruh yang positif variabel partisipasi pada kinerja manajerial. Riset ini sejalan riset (Badu et al., 2019; Rahmayati & Jamil, 2019) yang mengemukakan bahwasanya terdapat pengaruh yang positif antara partisipasi pembentukan suatu anggaran pada kinerja manajerial.

2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial di OPD Kabupaten Bantul

Sesuai analisis, dapat dilihat variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja manajerial karena *p value* 0,000 > 0.05. Manajer tingkat menengah OPD dalam melakukan tugasnya di pemerintah sudah mengetahui dengan jelas sasaran dan tujuan yang harus dicapai dalam meningkatkan kinerja untuk

mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan bahwasanya adanya sasaran anggaran tepat atau spesifik membuat pegawai OPD lebih produktif dan mendorong pegawai untuk dapat memberikan kinerja terbaiknya. Riset ini didukung riset (Efrizar, 2017; Wiprastini et al., 2014) yang mengemukakan bahwasanya terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran pada kinerja manajerial.

3. Pengaruh Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial di OPD Kabupaten Bantul

Sesuai analisis dapat dilihat variabel kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi kinerja manajerial karena p value $0,033 > 0,05$. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwasanya organisasi level atas telah melaksanakan pelimpahan otoritas dan tanggungjawab yang tinggi pada organisasi level bawah, penyerahan otoritas ini mampu memberikan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan pada organisasi level bawah maka dari itu akan mengoptimalkan suatu prestasi kerjanya. Hasil riset ini didukung (Darmawan, 2016; Hidayat, 2015) mengemukakan bahwasanya terdapat pengaruh positif variabel struktur desentralisasi pada kinerja manajerial.

4. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial di OPD Kabupaten Bantul

Sesuai analisis, dapat dilihat variabel kejelasan sasaran anggaran tidak mempengaruhi kinerja manajerial karena p value $0,768 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas publik tidak mampu mengoptimalkan kinerja manajerial di OPD Bantul. Secara praktis yang terjadi dilingkungan akuntabilitas publik tidak terdapat interaksi langsung dengan suatu kinerja manajerial, dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang manajer tingkat atas meimpahkan tanggungjawab pada manajer tingkat bawah ataupun staff lainnya supaya kerjanya dapat berjalan dengan baik, namun saat kerjanya tersebut berjalan tidak mampu efisien pada kerjanya serta tidak dapat melimpahkan tanggungjawab terkait pengalokasian anggaran (Heski et al.,

2017). Riset ini didukung (Heski et al., 2017) yang mengemukakan bahwasanya tidak ada pengaruh positif akuntabilitas pada kinerja manajerial.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bersumber atas hasil riset serta pembahasan maka didapatkan kesimpulan, diantaranya:

1. Partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif pada kinerja manajerial OPD Bantul.
2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada kinerja manajerial OPD Bantul.
3. Struktur desentralisasi berpengaruh positif pada kinerja manajerial OPD Bantul.
4. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh positif pada kinerja manajerial OPD Bantul.

B. Keterbatasan

Riset ini memiliki keterbatasan dalam melaksanakan riset yaitu sebagai berikut:

1. Metode yang dipakai pada pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner, maka dari itu terdapat kemungkinan beberapa kendala-kendala yang dijumpai, contohnya responden yang tidak sesuai dengan yang ditargetkan, jawaban responden yang tidak memuaskan, dan terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum dimengerti oleh responden yang mana akan memberikan output yang kurang memperlihatkan realita yang terjadi sebenarnya.
2. Riset ini hanya menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bantul untuk objek riset. Maka dari itu hasil riset ini belum mampu digeneralisasi ke Kota atau Kabupaten lain di Indonesia.

C. Saran

Sesuai riset dan pembahasan terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah Bantul diharapkan melakukan evaluasi untuk pejabat yang tidak sesuai dengan kemampuannya dengan jabatan yang dipegangnya saat ini (Melia & Sari, 2019).

2. Untuk riset selanjutnya peneliti berharap untuk memperoleh data dengan sumber yang berbeda dengan sumber yang berbeda contohnya mewawancarai responden-responden, sehingga mampu mengilustrasikan kondisi yang nyata serta menghindari pengisian kuesioner yang kurang sesuai (Melia & Sari, 2019).
3. Peneliti selanjutnya yang berkenan untuk meneliti riset yang sejenis, peneliti memberikan saran menambah variabel-variabel yang berbeda, contohnya SPI, komitmen organisasi serta kepuasan kerja serta memperluas objek riset (Melia & Sari, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- amertadewi, T. I. M., & Dwirandra, A. A. N. . (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan dan *Locus of Control* Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(3), 550–566.
- Anwar, S. M., & Sumiati. (2014). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Palopo). *Jurnal Manajemen*, 01(02), 84–94.
- Badu, I., Awaluddin, I., & Mas'ud, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, dan Struktur Organisasi Profesionalisme, Gaya Kepemimpinan, dan Struktur Organisasi Terhadap . *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (Jpep)*, 4(3), 99–113.
- Darmawan, R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Bengkalis. *JOM Fekon*, 3(1), 792–806.
- Efrizar, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *JOM Fekon*, 4(1), 1726–1740.
- Helmiyah, & Murhaban. (2016). Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan*, 11–25.
- Heski, P., Purwanti, D. T., & Fidayati, A. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Magelang). 345–352.
- Hidayat, T. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan *Locus of Control* Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Akuntabilitas*, 8(2), 148–161.
- Kenis, I. (1979). *Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance*. *The Accounting Review*, 54(4), 707–721.
- Laksana, A. P., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 177–186.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2006). *New Directions in Goal-Setting Theory*. 15(5), 265–269.
- Mahsun. (2006). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi Pertama). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (11th Ed.). Yogyakarta: Andi.
- Melia, P., & Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1068–1079.
- Milani, K. (1975). *The Relationship of Participation in Budget-Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitude*. *The Accounting Review*.
- Primastiwi, A., & Basuki, D. H. (2016). *The Impact of Clear and Measurable Goals, Decentralization, Performance Measurement Indicators, and Incentives on the Performance of Public Sector Organizations (Empirical Study of Local Government in the Region of Yogyakarta Province)*. 14–33.
- Rahmayati, A., & Jamil, N. A. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi, Akuntabilitas Publik dan Pengawasan Fungsional

Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi pada Dinas se-Kabupaten Wonogiri). *Jurnal Akuntansi*, 7(2), 112–126. <https://doi.org/10.26460/Ja.v7i2.780>

- Sumarno, J. (2005). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dan Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Kantor Cabang Perbankan Indonesia di Jakarta). *Jurnal Bisnis*, 14(2), 197–210.
- Supriyatno. (2010). Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme dan Struktur Organisasi pada Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Denpasar. *Universitas Udayana Denpasar*.
- Syahputra, Z. (2014). *Budget Participation on Managerial Performance : Related Factors in that Influenced To Government ' S Employee (Study of Indonesian Local Government)*. *Journal of Economic and Sustainable Development*, 5(21), 95–100.
- Ufairah, A. N., Tan, H. S., & Zamzani. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus pada Pemerintahan Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jambi*, 1(1), 1–11.
- Wiprastini, I. G. A. K. Y., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada 15 Skpd Berupa Dinas di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).

www.pemkabbantul.go.id